



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
SURAT TUGAS

Nomor: (02/F.1-UMJ/VIII/2023

Sehubungan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah penelitian maka dengan ini pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta menugaskan kepada :

Nama : Dr. Asep Setiawan, MA.
NIDN : 0316126303
Jabatan : Dosen Tetap FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta
Tugas : Penulisan Artikel Jurnal sebagai penulis kedua
Judul Artikel : **Strategi Politik Pemenangan Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba di Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan 2020**

Penerbit : Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Status : Penulis ke-2
Authors : Samsir Hamajen, Asep Setiawan, Lusi Andriyani
Publikasi : April 2023
ISSN No : 2721-9755
Page : Vol. 4, No. 1, 2022, Hal. 1-20, doi: [10.24853/independen.4.1.7-20](https://doi.org/10.24853/independen.4.1.7-20)

Demikian surat tugas ini dikeluarkan agar dapat dilaksanakan sebagai amanah, dan setelah selesai tugas harap membuat laporan ke Pimpinan.

Jakarta, 05 Agustus 2023

Dekan,



Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si.
NIDN: 0308127105

Pendekatan Indonesia dan Amerika Serikat Terhadap Proses Demokratisasi Myanmar

Asep Setiawan & Laode Muhammad Fathun

Universitas Muhamaadiyah Jakarta & UPN Veteran Jakarta

Email : Asep.setiawan@umj.ac.id & laodemuhammadfathun@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji pendekatan Indonesia dan Amerika Serikat terhadap demokratisasi Myanmar sebagai dampak dari globalisasi demokrasi. Amerika Serikat melakukan tekanan dan pemboikotan terhadap Myanmar agar melakukan proses demokratisasi. Sedangkan Indonesia memandang demokratisasi di Myanmar merupakan masalah dalam negeri dan tidak perlu campur tangan asing. Pendekatan Indonesia dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ASEAN termasuk melakukan apa yang disebut constructive engagement. Pendekatan Indonesia terhadap Myanmar tampaknya lebih cocok untuk terjadinya perubahan menuju negara yang demokratis.

Kata Kunci: Demokrasi, Myanmar, Indonesia, Amerika Serikat, ASEAN

ABSTRACT

The paper assesses the Indonesian and US approach toward Myanmar democratization as consequences of the globalization of democracy. The US put pressure and political and economic boycott on Myanmar to push the democratization process. On the other hand, Indonesia insists that democratization in Myanmar is part of its domestic affair and no need for foreign intervention. This approach is in line with the basic principles of ASEAN including to build constructive engagement with Myanmar. Indonesian approach seems more suitable to create changes toward democratization in Myanmar.

Keywords: Democracy, Myanmar Indonesia, US, ASEAN

PENDAHULUAN

Globalisasi demokrasi dan liberalisasi ekonomi dianggap sebagai satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan negara-negara sosialis di dunia. Tidak terkecuali apa yang terjadi di Myanmar. Setahun sebelum rubuhnya Tembok Berlin tahun 1990, sosialisme di Myanmar digulingkan oleh demonstrasi pro demokrasi yang dipimpin mahasiswa (Aung, 2016). Namun kemudian demonstrasi ini ditindas dengan kekerasan yang menelan banyak korban.

Setelah hampir lima puluh tahun di bawah junta militer, Myanmar mulai melakukan transisi menuju demokrasi (Renshaw, 2013). Salah satu petunjuknya adalah melaksanakan pemilihan umum yang dianggap demokratis oleh dunia internasional pada November 2015. Berlangsungnya pemilihan umum ini merupakan salah satu indikator bahwa demokrasi telah mulai berkembang di Myanmar. Dari pemilu tersebut maka terpilihnya lembaga legislatif yang memiliki tingkat keabsahan tinggi yang keputusannya dihormati di dalam dan luar

negeri. Sebelum mencapai jalan demokrasi yang stabil, Myanmar dikenal sebagai negara yang diperintah oleh kediktatoran militer. Militer merebut kekuasaan tahun 1990 ketika Partai Liga Demokrasi memenangkan pemilihan umum. Kudeta sebelum terbentuknya lembaga pemerintahan yang merepresentasikan rakyat ini berlangsung sampai lebih dari dua warsa.

Salah satu pendapat menyebutkan reformasi di Myanmar karena faktor perubahan *top-down* (Hlaing, 2009; Jagan 2011; Kurlantzik, 2012). Namun pendapat lain menyebutkan bahwa dalam jeda waktu menuju demokrasi itulah terjadi upaya eksternal agar Myanmar mengikuti jalan demokrasi seperti tetangga lainnya di Asia Tenggara (Renshaw, 2013). Amerika Serikat dan sekutunya mengambil jalan keras dengan menjatuhkan sanksi kepada Myanmar. Alasannya, pemaksaan melalui sanksi ini dapat mengubah wajah Myanmar menjadi Negara demokrasi. (Chun, 2008). Sampai belasan tahun sanksi Barat tidak membuat penguasa Myanmar menyerahkan kekuasaan kepada rakyat.

Di sisi lain, Indonesia melalui ASEAN mengajak Myanmar menjadi warga demokratis melalui pendekatan lain. Pendekatan yang dilakukan berbasiskan anggapan bahwa pengucilan Myanmar akan semakin menyulitkan terjadinya perubahan di dalam negerinya. (Van der Loos, 2004). Sanksi dan pengucilan yang dilakukan Barat membuat Rangoon lebih tertutup dari luar. Indonesia mengajukan apa yang disebut hubungan yang konstruktif untuk membuka pintu demokrasi di Myanmar.

Pendekatan antara Indonesia dan Barat yang direpresentasikan antara lain oleh Amerika Serikat menunjukkan bahwa demokratisasi di Myanmar bisa diberlakukan dengan jalan tekanan melalui sanksi atau melalui hubungan yang konstruktif seperti yang disuarakan Indonesia termasuk melalui ASEAN. Artikel ini ini akan mengkaji bagaimana pendekatan Amerika Serikat dan Indonesia ini dalam konteks globalisasi nilai-nilai demokrasi di Myanmar. Kemudian akan dikaji perbandingan kedua pendekatan ini.

KERANGKA ANALISIS

Isu Demokrasi Myanmar

Sebelum melihat bagaimana proses Myanmar menuju demokrasi ada baiknya melihat sekilas profil Negara ini. Myanmar terdiri dari masyarakat multikultural, multiras dan multi-agama. Secara resmi, ada 135 kelompok ras nasional yang terdiri dari delapan etnis. Menurut Sensus tahun 2014 (Wikipedia, 2016), etnis Bamar merupakan 69% dari penduduk Myanmar dan etnis Shan adalah kelompok etnis minoritas terbesar dengan 8,5%. Proporsi untuk etnis lain

ialah: Kayin, 6,2%, Rakhine 4,5%, Mon 2,4%, Chin 2,2%, Kachin 1,4%, Kayah 0,4%, dan lain-lain 5,4%. Dalam hal dominasi agama, Budha terdiri dari 89,4%, sedangkan Kristen yang terbesar kedua dengan 4,9%, Muslim 3,9%, Hindu 0,5%, dan penganut animisme, dll 1,3%. Meskipun ada kebebasan beragama di Myanmar, Budhisme tampaknya telah menikmati dukungan pribadi yang cukup besar dari kepemimpinan junta militer (Than, 2000).

Myanmar menempuh jalan demokrasi penuh dengan berbagai hambatan terutama dari kalangan militer. Setelah kemerdekaan Myanmar mengikuti sistem demokrasi seperti negara lainnya namun hanya berumur pendek. Junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win melakukan kudeta di tahun 1958 hingga 1960. Demokrasi sempat bersemi kembali setelah pemilu tahun 1960 yang dimenangkan oleh U Nu dengan partainya Union Party. Namun militer Myanmar kembali melakukan kudeta tahun 1962 yang mengakhiri demokrasi di Myanmar.

Meskipun demikian rejim militer menggunakan istilah berlakunya satu partai untuk tidak disebut sebagai diktator militer. Rejim Jenderal Ne Win hanya mengakui satu partai politik yakni Burmese Socialist Program Party (BSPP). Partai tunggal ini dibentuk dengan misi mendukung program pemerintah yakni “Burmese Way to Socialism”. Tahun 1988 setelah sekian lama rejim militer berkuasa barulah muncul aksi protes besar yang dipimpin para mahasiswa dan tokoh agama Budha. Mereka mengecam keras dominasi militer di pemerintahan. Diduga berkembangnya pandangan tentang tidak layaknya militer memimpin diakibatkan semakin terbukanya Myanmar ke dunia internasional akibat perubahan internasional. Militer menanggapi ancaman itu dengan kekerasan yang mengakibatkan sekitar 3000 aktivis mahasiswa dan anggota oposisi dilaporkan tewas.

Jenderal Ne Win mengundurkan diri digantikan oleh Jenderal Saw Maung pada tanggal 18 September 1988 dan diikuti dengan pembubaran *Burmese Socialist Program Party* atau BSPP serta didirikannya *State Law and Order Restoration Council* (SLORC). Tujuan didirikannya SLORC ini adalah untuk memulihkan keadaan negara dan berkuasa melalui Undang-Undang Darurat (Martial Law). Di bawah kepemimpinan Jenderal Saw Maung, kebijakan yang dihasilkan cenderung membawa perubahan bagi Myanmar dimana kebijakan tersebut lebih terbuka dengan negara lain terutama kerjasama dalam bidang ekonomi dan militer. Namun masih terdapat beberapa kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan alasan untuk menciptakan stabilisasi

politik, SLORC mengeluarkan rancangan kebijakan hukuman mati bagi setiap demonstran melalui aturan yang disahkan oleh legislatif pada 31 Mei 1989.

Hal ini merupakan bukti bahwasanya demokrasi yang diusung Jenderal Saw Maung hanyalah sebuah symbol saja. Lebih lanjut, Jenderal Saw Maung merencanakan penyelenggaraan pemilu untuk pemilihan anggota parlemen yang dikenal dengan sebutan Pyithu Hluttaw dengan tetap memberlakukan undang-undang darurat dan membekukan konstitusi 1974.

Atas persetujuan SLORC, maka diadakan pemilu multipartai yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1990. *National League for Democracy* (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi merupakan partai oposisi yang berhasil memenangkan pemilu tersebut. Pada pemilu tahun 1990, partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menerima 59,9% dari suara sah dan memenangkan 382 kursi, sementara partai politik pro-pemerintah SLORC, menerima 21,2% suara memenangkan 10 kursi. Melihat kondisi pemilu ini, pemerintah junta militer membatalkan hasil pemilu dan menahan Aung San Suu Kyi. Kejadian ini membuat hubungan bilateral AS-Myanmar menjadi semakin buruk, pemerintah junta militer dinilai otoriter dan melakukan pelanggaran HAM atas kegagalan untuk menghormati hasil pemilihan umum parlemen pada tahun 1990 (Than, 2000).

Keluarnya hasil pemilu yang berada diluar prediksi SLORC menimbulkan keterkejutan bagi junta militer, sehingga SLORC tidak mengakui hasil pemilu tersebut. Bahkan pimpinan partai NLD Aung San Suu Kyi, ditangkap dan dikenai hukuman tahanan rumah oleh Pemerintah Myanmar sejak tahun 1992.

Setelah pemilu 1990, Jenderal Saw Maung mengundurkan diri tahun 1993 dan digantikan oleh Jenderal Than Shwe. Setelah kemenangan NLD, SLORC menahan 262 aktivis NLD pada bulan Mei 1996 lalu, karena para aktivis ini mencoba untuk menyelenggarakan kongres NLD yang pertama mereka memenangkan pemilu 1990. Hal ini yang mengakibatkan Myanmar dikategorikan sebagai negara yang paling buruk dalam penegakan demokratisasi di kawasan Asia Tenggara.

Tekanan dari luar serta adanya simbol perjuangan demokrasi Aung San Suu Kyi menyebabkan perlahan-lahan terjadi perubahan. Namun dua tekanan secara garis besar dilakukan oleh Indonesia dan ASEAN melalui apa yang disebut *ASEAN Way*. Di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutunya berusaha memaksakan demokrasi dengan pendekatan

sanksi, pengucilan dan pemboikotan. Mana yang lebih memberikan tekanan di era globalisasi ini dalam menyemaikan demokrasi di Myanmar? Selanjutnya kita akan lihat bagaimana pendekatan yang dilakukan Amerika Serikat disusul kemudian kebijakan Indonesia dan mitranya di ASEAN.

Pendekatan Amerika Serikat

Sejak awal Amerika Serikat sangat kritis terhadap junta militer Myanmar. Negeri ini termasuk dalam kategori sebagai pos terdepan tirani selain Kuba, Korea Utara, Iran, Belarus dan Zimbabwe (Prashad, 2007:8). Amerika Serikat mengambil kebijakan dengan menggalang dunia internasional untuk mengisolasi Myanmar. Bahkan Kemlu AS mendesak Tiongkok dan India untuk menghentikan investasi di proyek gas dan minyak di Myanmar (Cherian, 2007:21). Mobilisasi yang dilakukan AS ini tidak begitu berhasil.

Namun bersama Eropa, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Myanmar. AS menyebut penguasa di Rangoon sebagai *reign of fear* atau rejim penyebar ketakutan dan bahkan memberlakukan pembatasan terhadap rejim termasuk larangan perjalanan ke Amerika Serikat bagi anggota junta dan keluarganya yang memperluas sanksi yang sudah berlaku selama satu dasa warsa.

Kampanye Amerika Serikat untuk demokrasi di Myanmar lebih fokus daripada kepada kebebasan dan demokrasi di Tiongkok. Konsekuensi dari menjatuhkan sanksi sanksi ke Myanmar adalah kesulitan bagi industrinya terutama bagi perusahaan yang tertarik memanfaatkan minyak di negeri itu. Oleh sebab itu sejumlah perusahaan minyak mendesak Amerika agar segera menyelesaikan masalah dengan Myanmar. Bagi Washington kata-kata seperti tirani dan liberti, kebebasan dan demokrasi merupakan hal berharga namun di mata rakyat Myanmar kata-kata itu seperti hanya hiasan untuk negara penjajah.

Penerapan *Coercive Diplomacy* Amerika Serikat terhadap junta Militer Myanmar telah dimulai pertamakali pada akhir April 1997, dengan menerapkan sanksi embargo ekonomi berupa penghentian segala macam investasi AS yang akan masuk ke Myanmar (Haryono, 1997). Sanksi tersebut dijatuhkan oleh AS kepada Myanmar karena bentrokan yang terjadi pada tahun 1988, yang merupakan awal mulainya kekacauan dalam mengelola ekonomi dan terjadinya penindasan politik yang dilakukan oleh pemerintah, alah satunya dengan menjadikan Aung San Suu Kyi sebagai tahanan politik, sehingga menyebabkan pemberontakan atau demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa.

Akibat peristiwa tersebut, AS menjadi ikut campur dengan konflik yang terjadi di Myanmar karena hal tersebut benar-benar telah melanggar HAM dan demokrasi. Meski sanksi tersebut hanya dilakukan sepihak oleh AS tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Myanmar, namun diharapkan pemerintah dapat menghentikan aksinya dalam pelanggaran HAM dan demokrasi tersebut lalu dapat segera membebaskan pemimpin dan para tokoh pro-demokrasi NLD yang ditahan.

Sanksi AS tersebut lalu dibuat ke dalam undang-undang khusus tentang Myanmar dan hal itu dianggap sebagai tekanan paling keras datang dari AS, dengan dicanangkannya suatu undang-undang Kebebasan dan Demokrasi Myanmar. Undang-undang khusus itu mulai berlaku efektif pada bulan September 2003, jika Junta tidak membebaskan Suu Kyi dan belum melaksanakan proses demokratisasi. Dalam undang-undang tersebut antara lain ditetapkan, AS menutup pasarnya terhadap segala produk Myanmar dan langkah tersebut memberikan isyarat yang jelas kepada Junta bahwa penahanan ikon demokrasi Suu Kyi maupun represi terhadap masyarakat Myanmar tidak bisa ditoleransi.

Berbagai langkah AS yang menekan diberlakukan kepada Myanmar. Pada 28 Juli 2003, Presiden George W. Bush mengeluarkan Executive Order (EO) yang memberlakukan sanksi terhadap Myanmar sesuai dengan Burmese Freedom and Democracy Act (BFDA). Executive Order 13310, berisi draft pelarangan impor produk dari Myanmar dan ekspor jasa keuangan ke Myanmar, serta membekukan aset SPDC dan tiga lembaga keuangan perdagangan luar negeri Myanmar. Pilihan untuk mengukur kebijakan dalam pelaksanaan sanksi ini tergantung pada sifat dan perubahan yang diinginkan. Represi berikutnya, terjadi atas tindakan keras junta militer terhadap demonstran damai pada bulan September 2007 membuat hubungan bilateral menjadi semakin tegang. Untuk melancarkan isolasi terhadap Myanmar, maka AS memilih untuk menambah penjatuhan sanksi. Pada 27 September 2007, Departemen Keuangan AS menunjuk 25 pejabat senior pemerintah Myanmar sebagai subjek atas pem-blokiran aset dalam *Executive Order* 13310. Pada 18 Oktober 2007, Presiden George W. Bush mengumumkan *Executive Order* (EO 13448), dengan memperluas kewenangan untuk memblokir aset individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dan korupsi publik (Presidential documents, 2007).

Pengaruh AS sangat dirasakan bagi rakyat Myanmar sehingga masyarakat Myanmar yang hidupnya sudah susah serta tertekan dibawah represi Junta menjadi bertambah menderita, hal tersebut terjadi ketika AS melaksanakan ancaman sanksi ekonomi yang keras.

Diterapkannya sanksi ekonomi AS terhadap Myanmar, terbukti dengan sebagian pengusaha sudah mengantisipasi sanksi AS dengan menutup pabriknya dan bukan saja hanya 300 industri tekstil Myanmar dipertaruhkan tetapi juga nasib lebih dari 350.000 pekerja dan anggota keluarganya.

Tidak hanya sanksi ekonomi, pemerintah AS juga menjatuhkan sanksi larangan visa untuk lebih dari 30 anggota Junta Militer Myanmar beserta keluarga mereka. Selain itu, Kementerian Luar Negeri AS lebih jauh memperingatkan larangan visa tambahan akan diberlakukan terhadap orang-orang yang bertanggungjawab atas berlanjutnya serangan-serangan terhadap warga sipil tidak berdosa, serta berbagai pelanggaran HAM lainnya.

Dari berbagai macam tindakan politik dan ekonomi yang dilakukan oleh AS kepada Myanmar sangat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan sosial ekonomi Myanmar, yang membuat pemerintahan militer tidak dapat lagi mengelak dengan besarnya tekanan-tekanan tersebut, sebab dari sikap antipati dari AS ke junta militer, masyarakat internasional pun akhirnya berlaku yang sama dengan sikap AS, yang akhirnya membuat pemerintahan untuk mulai mengikuti permintaan masyarakat internasional yang berharap Myanmar dapat menjadi negara yang demokratis,.

Cara yang dilakukan Amerika Serikat untuk mendemokrasikan Myanmar diambil dengan tekanan dan pengucilan. Rakyat sangat merasakan kesulitan selama sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat meskipun mendapat uluran tangan dari Tiongkok. Tekanan dari Barat inilah yang juga ikut membentuk pemerintahan Myanmar untuk pada akhirnya memilih jalan demokrasi.

Pendekatan Indonesia

Bagi Indonesia isu mengenai Myanmar merupakan hal yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Permasalahan di negara ini telah lama dan berlarut-larut. Konflik yang terjadi di dalam negara Myanmar bukan hanya mengenai ketiadaan demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga merupakan gabungan permasalahan kompleks antara permasalahan sosial dan perpecahan etnis. Dalam hal ini Indonesia mencoba untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemilu dan memperbaiki situasi politik di Myanmar. Selain itu penegakan isu HAM di Myanmar juga menjadi prioritas utama bagi Indonesia mengingat banyaknya terjadi pelanggaran HAM di Negara tersebut.

Sepanjang transisi pemerintahan negara dalam demokratisasi, Indonesia melalui The Institute for Peace and Democracy mengambil peran dalam penanaman dan

pemahaman nilai-nilai demokrasi bagi Negara Myanmar. The Institute Peace and Democracy (IPD) merupakan suatu lembaga yang bersifat independen dan non profit dan merupakan hasil inisiatif pemerintah Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan mempromosikan demokrasi serta dapat dicermati sebagai bagian dari peran politik luar negeri Indonesia untuk membentuk institusi internasional dan menyelenggarakan forum dengan mengundang negara-negara sahabat.

Lembaga ini merupakan kerjasama antara Universitas Udayana dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Nasional. Keberadaan IPD di Bali juga bertujuan untuk mendukung terwujudnya program-program dari *Bali Democracy Forum* (BDF), BDF merupakan prakarsa dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintah RI untuk mengembangkan demokrasi yang dibentuk atas gagasan, ditujukan sebagai wadah komunikasi antar para pemimpin negara se-dunia menyangkut isu-isu perdamaian dan demokrasi.

Melalui *Bali Democracy Forum* (BDF), Indonesia berupaya mendorong demokrasi di kawasan Asia Tenggara dan Asia. Oleh karena itu BDF kemudian didukung dengan pembentukan Institute for Peace and Democracy (IPD). Melalui kegiatan BDF dan IPD ini Indonesia sesungguhnya sekaligus juga menebarkan benih-benih demokrasi agar bisa tumbuh subur tidak hanya di Indonesia tetapi juga dikawasan Asia dan bahkan dunia.

Peranan Indonesia ini dilakukan pertama kali melalui event *Bali Democracy Forum* (BDF) pada tahun 2008. Melalui event ini, negara Myanmar menyetujui beberapa kesepakatan yang ditetapkan pada beberapa pelaksanaan event tersebut. Seperti pada event *Bali Democracy Forum I* pada tahun 2008, Myanmar mengambil komitmen untuk memperkuat dan mengembangkan proses elektoral, meningkatkan peranan partai politik, menjunjung tinggi peran hukum dan memperkuat integritas dan kapasitas yudisial, mengembangkan dan memelihara *check and balance* diantara badan penyelenggara pemerintahan, mempromosikan *good governance* (transparansi dan akuntabilitas), mempromosikan demokrasi dan perkembangan social ekonomi, termasuk di dalamnya ketahanan ekonomi nasional dan kawasan, memastikan akses untuk kebutuhan public, menyuburkan peranan wanita dan harmoni, menyuburkan partisipasi kelompok sipil dan pemuda, mempromosikan peranan media massa dalam penggunaan IT untuk mempromosikan komunikasi politik.

Dalam BDF III, Myanmar juga sepakat menyatakan bahwa demokrasi dapat bertahan dan berkembang di negara yang memiliki supremasi hukum, *good governance* dan media massanya menikmati kebebasan dan komunitas sipilnya diperkuat dan memiliki akses terhadap informasi (Sidauruk, 2015).

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah konkret untuk membantu pemerintah Myanmar melewati permasalahan domestiknya. Upaya tersebut ditempuh dalam berbagai tingkatan: diplomasi bilateral, regional dan multilateral. Di tingkat bilateral, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menempuh jalur diplomasi untuk mendorong rekonsiliasi nasional dan penyelesaian konflik di Myanmar yang melibatkan etnis Rohingya dengan menemui Menteri Luar Negeri Myanmar, Wunna Maung Lwin, pada tanggal 7 Agustus 2012 di Myanmar. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Marty menganjurkan agar Myanmar membuka dan member akses bagi bantuan kemanusiaan dan OKI untuk meninjau situasi faktual pasca konflik di Negara Bagian Rakhine. Anjuran tersebut ditindak lanjuti oleh pemerintah Myanmar dengan membuka tapal batasnya bagi bantuan-bantuan asing dan OKI.

Dalam kunjungannya Hassan Wirajuda dan rombongan selaku Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada tanggal 26 Agustus- 1 September 2012 juga menyampaikan bahwa perubahan yang terjadi di Myanmar cukup signifikan terutama dalam perspektif ekonomi dan sosial budaya. Kota Yangon telah berkembang secara dinamis yang ditandai dengan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur serta roda ekonomi yang bergerak positif. Kegiatan pembangunan infrastruktur juga terlihat di ibukota negara di Nay Pyi Daw, khususnya dalam menyambut penyelenggaraan SEA Games tahun 2013 serta persiapan Myanmar menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2014.

Upaya Indonesia dalam memastikan kemajuan proses demokrasi di Myanmar juga mendapatkan apresiasi dari Amerika Serikat yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dalam pertemuan bilateral kedua belah negara di Kementerian Luar Negeri Jakarta. Hal lain terkait Indonesia dan Myanmar, kedua negara berada di dalam kawasan yang sama sehingga tindakan yang dilakukan oleh sebuah negara baik yang dilakukan untuk kepentingan domestik maupun bagi kepentingan internasional, akan berpengaruh pada stabilitas kawasan tempat di mana negaranegara tersebut berada.

Namun tidak mudah bagi Indonesia untuk ikut serta membantu proses demokratisasi yang terjadi di Myanmar, meskipun kedua negara merupakan negara anggota ASEAN akan tetapi sebagai negara yang berdaulat kedua Negara harus

menghormati prinsip non-intervensi ataupun turut campur atas suatu persoalan yang dialami oleh negara anggota lainnya yang melekat pada setiap tubuh negara anggota ASEAN. Pemerintah Myanmar juga telah mengatakan bahwa dinamika yang terjadi merupakan konflik dalam negeri, yang tidak dapat dicampuri penyelesaiannya oleh negara manapun.

Tentu saja ini merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Indonesia harus mampu memberikan pertimbangan yang bisa diterima Myanmar bahwasanya permasalahan demokratisasi dan pelanggaran HAM yang terjadi bukan hanya permasalahan domestik saja, akan tetapi ini juga merupakan permasalahan bagi kawasan ASEAN dan negara anggotanya. Tentunya tetap dengan menghormati kedaulatan dan integritas negara-negara anggota ASEAN diharapkan pengalaman Myanmar untuk kembali ke jalan demokrasi, suatu saat mampu menyumbang bagi upaya Indonesia dengan dukungan banyak negara di dunia dalam memperkuat demokrasi di Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Pendekatan dengan mengedepankan dialog ini dapat dilihat dengan munculnya apa yang disebut *Seven Steps Roadmap to Discipline-Flourishing Democracy*. Kebijakan ini merupakan salah satu program politik yang disampaikan oleh Perdana Menteri Khin Nyut pada pertemuan di gedung Pyithu Hluttaw pada tanggal 30 Agustus 2003. Ketujuh langkah dalam menciptakan pemerintahan demokratis tersebut adalah (Roadmap to Democracy):

1. Kembali mengadakan Konvensi Nasional yang telah diberhentikan sejak tahun 1996
2. Setelah Konvensi Nasional ini sukses diadakan, pemerintah akan menerapkan langkah demi langkah proses yang diperlukan untuk diadakannya system demokrasi yang sejati dan disiplin.
3. Penyusunan Konstitusi baru yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Konvensi Nasional.
4. Mengadopsi konstitusi ini sebagai awal dari referendum nasional.
5. Mengadakan pemilihan legislatif (Pyithu Hluttaw) yang bebas dan adil sesuai dengan konstitusi baru.
6. Diselenggarakannya rapat Hluttaws yang dihadiri oleh anggota Hluttaw sesuai dengan konstitusi baru.
7. Membangun negara modern, maju dan demokratis yang dipimpin oleh seorang kepala negara yang dipilih oleh Hluttaw yang didukung oleh pemerintah dan organ penting lainnya yang juga akan dibentuk oleh Hluttaw tersebut.

Poin-poin tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan Indonesia dan ASEAN telah diserap dengan memasukkan nilai-nilai demokratis dalam system politik Myanmar. Walaupun pada saat itu baru berupa niat untuk menuju demokrasi namun kalau dicermati lagi tampak bahwa adanya pemilihan legislatif yang dicanangkan akan membuka jalan kepada demokrasi di Myanmar

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif analisis. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan menggunakan sumber data sekunder dari berbagai referensi yang relevan baik berupa buku, artikel jurnal, laporan atau jenis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data telaah Pustaka dengan Teknik analisis kualitatif melalui proses trasing. Penelitian ini menggunakan analisis komparasi untuk menginterpretasikan perilaku negara dalam melakukan Tindakan dalam menyelesaikan kasus Myanmar. Pendekatan komparasi adalah strategi untuk melihat sisi keunikan dari masing-masing variabel yang diteliti untuk menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam penyelesaian suatu kasus tertentu.

PEMBAHASAN

Perbandingan

Dari dua cara tersebut terdapat sejumlah pelajaran yang bias ditarik ketika era globalisasi nilai-nilai demokrasi ini hendak ditularkan atau hendak dipaksakan kepada Negara lain. Setiap negara mengambil cara-caranya sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dianutnya. Pertama, Amerika Serikat sebagai negara yang merasa sebagai penjaga dan pembela demokrasi melakukan dengan cara paksaan dan pengucilan kepada Myanmar. Sejak awal Amerika melihat junta militer sebagai musuh demokrasi dan harus diperangi. Tidak terelakkan lagi jika kebijakan utamanya adalah menjatuh sanksi ekonomi, melakukan embargo, melakukan pelarangan, melakukan pengucilan dan mengkritik negara yang berhubungan dan duduk bersama Myanmar.

Kebijakan Amerika Serikat ini mencerminkan salah satu sifat negara besar yang ingin memaksakan kehendaknya menyebarkan nilai demokrasi di Myanmar. Asumsinya adalah junta militer harus disingkirkan dengan berbagai cara sehingga menjadi pembuka jalan bagi terjadinya demokratisasi. Namun karena junta militer ini kuat Amerika Serikat bahkan tidak bias menjatuhkannya untuk menggantikannya dengan rejim demokrasi.

Kedua, bagi Amerika Serikat karena sanksi tidak memberikan dampak jatuhnya rejim militer, sebaliknya membuat rakyat menderita maka Washington menggunakan instrumen symbol-simbol pro-demokrasi sebagai cantelan agar gelombang demokratisasi terjadi. Simbol itu ditemukan dalam diri Aung San Suu Kyi salah seorang anak dari Bapak Pendiri Burma waktu itu. Namun Amerika Serikat yakin dengan tekanan dan pengucilan ini akan mempercepat hasil kepada demokratisasi di Myanmar. Dengan memermalukan Myanmar di muka dunia, Washington menganggap efektif mendorong rejim militer untuk menyerahkan kekuasaan kepada sipil. Amerika bahkan berusaha untuk mengekspos kelemahan penguasa militer Myanmar melalui kampanye dunia. Tekanan dan pengucilan dari Amerika Serikat ini menambah kesulitan Myanmar dalam melakukan hubungan diplomatik dengan Negara lain.

Sedangkan Indonesia sebaliknya berusaha mendekati Myanmar dengan cara-cara berbeda. Indonesia tidak menjauhi dan mengucilkan Myanmar di Asia Tenggara, bahkan setelah masuk ASEAN 1979 masih diupayakan agar betah di ASEAN sehingga masih ada kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan demokrasi melalui berbagai pertemuan dan acara.

Dengan membuka komunikasi ini, Indonesia masih berkesempatan melakukan bujukan secara bertahap terhadap penguasa Myanmar. Ide-ide demokrasi – yang Indonesia pun sedang pada tahap menumbuhkan dan mengembangkannya – disampaikan dalam sejumlah forum. Melalui berbagai forum ini para pejabat Myanmar yang kebanyakan berlatar militer mulai mengetahui urgensi demokrasi bagi kehidupan di dalam negeri dan tata pergaulan internasional.

Indonesia mengenalkan ide demokrasi ini tidak melalui permusuhan tetapi sifatnya merangkul. Sikap ini barangkali tidak ditemukan di Negara-negara Barat yang sudah lama tumbuh nilai dan tatanan demokrasi. Oleh sebab itu Barat memiliki kecenderungan tidak sabar dalam menyebarkan paham demokrasi ke Negara-negara lain.

Barangkali pendekatan Indonesia ini tidak bisa dilakukan oleh negara lain karena latar belakang sejarah berdemokrasi yang berbeda. Proses yang dilakukan Indonesia untuk menjadikan Myanmar ikut dalam gerbong demokrasi ini juga berlangsung lama dan tidak jarang bersifat kompleks. Namun demikian model pendekatan terhadap demokratisasi di Asia Tenggara dengan melakukan apa yang disebut *constructive engagement* telah

memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan Myanmar. Pendekatan ini juga dapat disebut efektif karena masih menempatkan negara lain sebagai mitra yang sejajar.

KESIMPULAN

Junta militer Myanmar yang berkuasa sangat lama akhirnya menerima sejumlah prinsip demokrasi karena arus globalisasi nilai-nilai demokrasi dari Barat dan Asia. Tekanan dari Amerika Serikat memiliki peran kepada terjadinya berbagai dinamika di dalam negeri Myanmar namun bisa dikatakan pendekatan melalui sanksi ekonomi tidak menjadikan Myanmar berkeinginan menjadi negara demokratis. Kebijakan Amerika Serikat melalui berbagai larangan kepada para pejabat militer dan keluarga, larangan perdagangan dan impor serta pengucilan secara internasional semakin menjadikan Myanmar tertutup. Satu-satunya keberhasilan pendekatan Amerika Serikat terhadap Myanmar adalah semakin menderitanya rakyat di bahwa sanksi ekonomi dan semakin kuatnya junta militer memegang kekuasaan.

Pendekatan lain yang dilakukan Indonesia menempatkan Myanmar sebagai mitra yang dikehendaki merangkul prinsip-prinsip dan nilai demokrasi melalui berbagai forum termasuk dalam ASEAN. Indonesia memandang bahwa pengucilan dan sanksi sebagai jalan untuk membuka kunci terjadinya demokratisasi tidak selalu efektif. Jakarta memberlakukan apa yang disebut sebagai *constructive engagement* dengan harapan secara bertahap elit Myanmar terutama militernya menerima nilai demokrasi yang tidak menghilangkan peran mereka dalam politik. Melalui berbagai forum di Asia Tenggara termasuk *Bali Democracy Forum*, nilai-nilai demokrasi itu seperti akuntabel pemerintahan mulai diperkenalkan dan juga didorong menjadi komitmen pemerintah Myanmar. Pendekatan Indonesia ini yang didukung oleh beberapa anggota ASEAN telah menjadikan Myanmar mau menerima arti demokrasi yang bisa diterapkan di negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chun, Kwangho. 2008. "External Intervention and Democratisation in Myanmar: A Policy Evaluation." King's College London.
- Haryono, Endi. 1997. "ASEAN Menanggapi Sanksi Ekonomi AS terhadap Myanmar 1997." *Paradigma*. Vol. 1. No. 2.
- Hlaing, Kyaw Yin. 2008. ASEAN's Pariah: Insecurity and Autocracy in Myanmar (Burma), in: D. Emmerson (ed.), *Hard Choices: Security, Democracy and Regionalism in Southeast Asia*, Stanford, CA: Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center Books, 151–190.
- Huang, Roger Lee. 2016. Myanmar's Way to Democracy and the Limits of the 2015 Elections. *Asian Journal of Political Science*.
- Jagan L. 2012. Late Burma Spring Signals Tentative Change, in: *Asian*

- Conversations*, 1 January, online: <www.asianconversations.com/BurmaSpring.php>
- Kurlantzick, J. 2012. Why Burma's Free Election Wasn't All It Was Cracked Up To Be, in: *New Republic*, 3 April, online: <www.newrepublic.com/article/world/102279/burma-elections-aung-san-kyi#> .
- Lee, Lavina. 2014. "Myanmar's Transition to Democracy: New Opportunities or Obstacles for India?" *Contemporary Southeast Asia* Vol. 36, No. 2, pp. 290-316.
- Lidauer, Michael. "Democratic Dawn? Civil Society and Elections in Myanmar 2010–2012." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 2012: 87–114.
- Pradhan, Sanjay Kumar. 2008. "Struggle for Democracy in Myanmar : Response of Neighbours, United States and ASEAN." *Jadavpur Journal of International Relations*.
- Presidential Documents. Blocking Property and Prohibiting Certain Transactions Related to Burma, Executive Order 13448 of October 18, 2007.
- Renshaw, Catherine Shanahan. 2013. "Democratic Transformation and Regional Institutions: The Case of Myanmar and ASEAN". *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 1/2013:29-54.
- Sidauruk, Wilson Rojeki. 2015. *Peran The Institute for Peace and Democracy (IPD) Dalam Demokratisasi di Myanmar*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Siemers, Gunter. 1993. Myanmar 1992: Heading For "Guided Democracy"? *Southeast Asian Affairs*. pp. 245-266.
- Than. Tin Maung Maung. 2000. "Myanmar: The Dilemma of Stalled Reforms." *Fellow ISEAS*. No. 10. hal. 2.
- Thawngmung, Ardeth. 2016. "The Myanmar Elections 2015: Why the National League for Democracy Won a Landslide Victory." *Critical Asian Studies*. 48:1, 132-142.
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Myanmar>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Roadmap_to_democracy
- Van der Loos, Kenny. 2014. *Indonesia's Policy Towards an ASEAN Pariah Striking a Balance between Democratic Values and Constructive Engagement*. Thesis di Universiteit Leiden.
- Zaw Aung. 2016. "Emerging Democracy and Ethnic Identity Crisis in Myanmar." Dalam Chantana Banpasirichote Wungaeo, Boike Rehbein Surichai Wun'gaeo (eds). *Globalization and Democracy in Southeast Asia: Challenges, Responses and Alternative Futures*. London: Palgrave Macmillan.